

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi besar dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan layanan hukum oleh notaris. Salah satu bentuk adaptasi terhadap era digital adalah konsep *cyber notary*, yaitu pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan kewenangan notaris, seperti autentikasi dokumen dan penyimpanan elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *cyber notary* dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik serta mengkaji sinkronisasi pengaturannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Permasalahan yang diangkat mencakup: (1) Bagaimana penerapan *cyber notary* dalam sistem pemerintahan berbasis digital? dan (2) Bagaimana sinkronisasi pengaturan *cyber notary* dalam UUJN di era digital? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *cyber notary* masih menghadapi hambatan teknis, hukum, dan kelembagaan, terutama terkait validitas dokumen elektronik, perlindungan data, serta ketiadaan pengaturan eksplisit dalam UUJN. Oleh karena itu, sinkronisasi antara UUJN dengan regulasi terkait sistem elektronik instansi pemerintah, seperti Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan PP No. 71 Tahun 2019 tentang PSTE, menjadi krusial untuk mewujudkan layanan kenotariatan yang adaptif, sah, dan berdaya guna di era digital.

**Kata Kunci:** *Cyber Notary*, Undang-Undang Jabatan Notaris, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sinkronisasi Regulasi.

## ***ABSTRACT***

The development of information and communication technology has driven a major transformation in governance, including in the provision of legal services by notaries. One form of adaptation to the digital era is the concept of cyber notary, namely the use of technology in the implementation of notary authority, such as document authentication and electronic storage. This study aims to analyze the application of cyber notary in an electronic-based government system and examine the synchronization of its regulations in the Notary Law (UUJN). The problems raised include: (1) How is the application of cyber notary in a digital-based government system? and (2) How is the synchronization of cyber notary regulations in the UUJN in the digital era? This study uses a normative legal approach with primary and secondary data sources through literature studies. The results of the study show that the application of cyber notary still faces technical, legal, and institutional obstacles, especially related to the validity of electronic documents, data protection, and the absence of explicit regulations in the UUJN. Therefore, synchronization between the UUJN and regulations related to the electronic system of government agencies, such as Presidential Regulation No. 95 of 2018 concerning SPBE and PP No. 71 of 2019 concerning PSTE, is crucial to realize adaptive, legitimate, and efficient notary services in the digital era.

**Keywords:** *Cyber Notary*, **Notary Law**, **Electronic-Based Government System**, **Regulation Synchronization**.